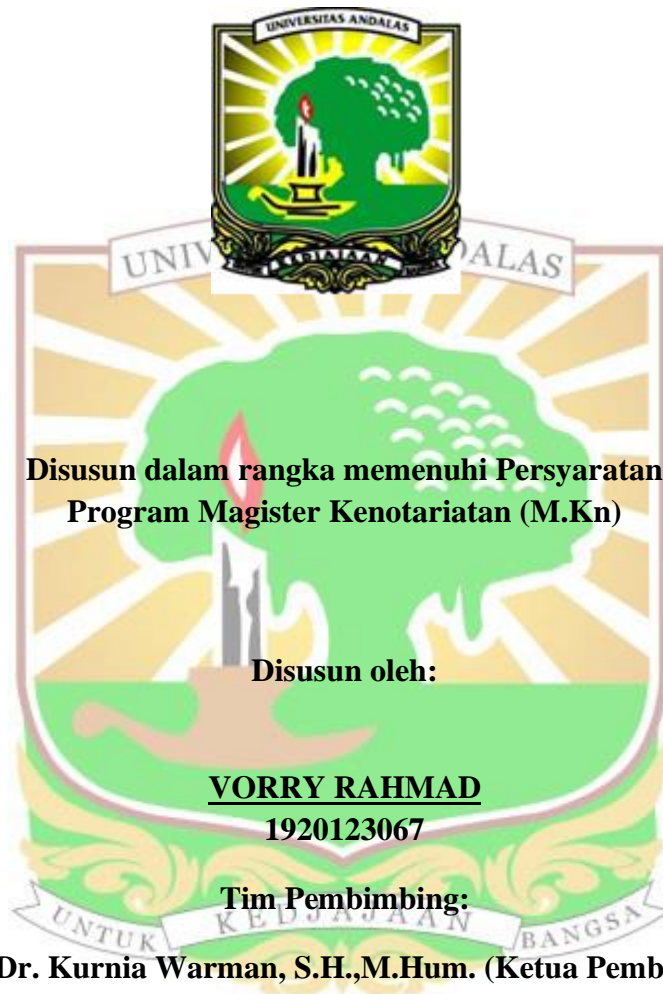


**PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG
KEPADA PEMERINTAH DAERAH
(STUDI PADA KABUPATEN TANAH DATAR)**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2023

**PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG KEPADA
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Kabupaten Tanah Datar)**

(Vorry Rahmad, NIM: 1920123067, Program Magister Kenotariatan, Fakultas
Hukum Universitas Andalas, 113 halaman, 2023)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah, serta kepastian hukum pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang diserahkan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan atau pengolahan data primer dan wawancara terhadap narasumber terkait. Hasil penelitian menemukan permasalahan yang sering terjadi dalam penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah adalah belum disosialisasikannya Peraturan terkait Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada pengembang sehingga sampai saat ini belum terdapat penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup perlu mensosialisasikan kepada *stakeholders* terkait diantaranya pengembang dan masyarakat serta menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah sesuai dengan amanat Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu melakukan kerja sama dengan Kantor Pertanahan untuk mendapatkan data terhadap perumahan dan permukiman yang belum memiliki rencana tapak (*site plan*) sehingga dapat tetap dilakukan penyerahan, serta kerja sama dengan PPAT untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin akurasi data yang dituangkannya ke dalam Akta.

Selanjutnya pada tahap proses pendaftaran atau penatausahaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah sehingga penyerahan Prasarana, Sarana dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah dapat dioptimalkan.

Kata Kunci: Penyerahan Praasarna, Sarana dan Utilitas Umum

HANDOVER OF HOUSING AND SETTLEMENT INFRASTRUCTURE, FACILITIES AND UTILITIES FROM DEVELOPERS TO REGIONAL GOVERNMENTS

(Studies at the Government of Tanah Datar Regency)

*(Vorry Rahmad, Student Identification Number: 1920123067, Master of Notary
Program, Faculty of Law, Andalas University, Number of Pages: 113, 2023)*

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the delivery of housing and settlement infrastructure, facilities and utilities from developers to local governments, as well as legal certainty in the management of the submitted housing and settlement infrastructure, facilities and utilities. This study uses empirical juridical methods with primary data collection or processing techniques and interviews with relevant informants. The results of the study found that the problem that often occurs in the delivery of housing and settlement infrastructure, facilities, and utilities from developers to local governments is that the Regulations related to the Handover of Housing and Settlement Infrastructure, Facilities and Utilities have not been socialized to developers so that until now there has been no submission of Infrastructure, Housing and Settlement Facilities and Utilities from the Developer to the Government of Tanah Datar Regency

In this case the Government of Tanah Datar Regency through the Public Housing, Settlement Areas and Environment Service needs to disseminate information to relevant stakeholders including developers and the community and develop regulations in the form of Regional Regulations in accordance with the mandate of Article 26 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 9 of 2009, to the Government of Tanah Datar Regency needs to cooperate with the Land Office to obtain data on housing and settlements that do not yet have a site plan so that submissions can still be made, as well as cooperation with PPAT to provide legal certainty and ensure the accuracy of the data collected. poured into the Deed.

Furthermore, at the stage of the registration or administration process of housing and settlement infrastructure, facilities, and utilities that have been submitted by the developer to the Tanah Datar District Government to comply with the provisions of the Minister of Home Affairs Regulation Number 9 of 2009 concerning Guidelines for Handing Over of Infrastructure, Facilities, and Public Utilities Housing and Settlements in the Regions so that the delivery of infrastructure, facilities and utilities from the developer to the Regional Government can be optimized.

Keywords: *Submission of Public Infrastructure, Facilities and Utilities*